

# ***Single Identity Number: Sebuah Solusi Permasalahan Identitas Kependudukan di Indonesia***

**Rahmad Mahendra**

*rm.csui04@gmail.com*

## ***Lisensi Dokumen:***

*Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com*

*Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.*

Identitas kependudukan yang tunggal dan unik adalah salah satu prasyarat terlaksananya *good governance*. Di Indonesia, sampai saat ini berbagai identitas masih digunakan untuk kepentingan masing-masing tanpa adanya sinkronisasi data. Inefisiensi biaya serta pelayanan masyarakat yang cenderung lamban dan kurang terpadu adalah sebagian kecil implikasi dari permasalahan identitas kependudukan. Perlu sebuah pendekatan integratif untuk menangani persoalan identitas kependudukan di Indonesia. Gagasan *Single Identity Number* adalah suatu solusi yang penulis tawarkan.

## **Latar Belakang**

Dewasa ini penduduk Indonesia memiliki berbagai macam jenis identitas. Identitas tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berbeda untuk kepentingan bervariasi, padahal identitas-identitas tersebut mengacu kepada orang yang persis sama. Berbagai jenis identitas yang bisa dimiliki menyebabkan adanya kemungkinan orang yang memiliki identitas ganda. Persoalan identitas ganda tidak hanya terbatas pada definisi terdapat seseorang yang mempunyai dua atau lebih tanda pengenal. Identitas ganda berimplikasi pada masalah terganggunya keamanan negara, pembangunan yang terhambat, terjadinya kecurangan dalam transaksi kependudukan, dan berbagai dampak yang berkaitan erat dengan aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, paling sedikit ada 32 instansi yang mengeluarkan nomor identitas dan merekam data kependudukan. Nomor tersebut ada yang berbasis personal (seperti KTP, SIM, dan Jamsostek) dan yang lain berbasis spasial (seperti sertifikat tanah dan PBB). Masing-masing nomor berbeda tergantung kepentingan instansi yang mengeluarkan. Sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing instansi tidak terkait satu sama lain. Replikasi dan redundansi data kependudukan tidak terhindarkan, sehingga terjadi inefisiensi penggunaan sumber daya. Tabel 1 di bawah ini menyajikan 32 identitas unik yang mungkin dimiliki oleh penduduk Indonesia.

Tabel 1. Identitas yang Unik yang Dikeluarkan Berbagai Instansi di Indonesia

<b>Basis Informasi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Identitas</b>	<b>Instansi</b>
Personal	KTP	Nomor KTP	Pemda
Personal	Kartu Keluarga	Nomor KK	Pemda
Personal	Paspor	Nomor paspor	Imigrasi
Personal	SIM	Nomor SIM	Kepolisian
Personal	BPKB	Nomor BPKB	Kepolisian
Personal	NPWP	Nomor NPWP	Ditjen Pajak
Personal	N.I.P.	Nomor Induk Pegawai	BAKN
Personal	N.R.P.	Nomor Registrasi Prajurit	Dephan/TNI
Personal	Perbankan	Nomor kartu kredit	Bank
Personal	Kartu ATM	Nomor kartu ATM	Bank
Personal	Rekening Bank	Nomor rekening	Bank
Personal	Asuransi	Nomor polis	Perusahaan asuransi
Personal	Asuransi	Nomor Askes	Depkes
Personal	Asuransi	Nomor Astek	Depnakertrans
Personal	Akta kelahiran	No. akta kelahiran	Kantor Catatan Sipil
Personal	Akta nikah	No. akta nikah	Depag
Personal	N.O.P	Nomor Objek Pajak	Ditjen Pajak
Personal	Kartu pemilih	Nomor pemilih	KPU
Bidang	Sertifikat HAT	Nomor sertifikat	BPN
Bidang	IMB	Nomor IMB	Pemda
Bidang	SPPT	Nomor SPPT (NOP)	Ditjen Pajak
Bidang	Tagihan listrik	Nomor pelanggan	PLN
Bidang	Tagihan telepon	Nomor pelanggan	Telkom
Bidang	Tagihan PDAM	Nomor pelanggan	PDAM
Bidang	Tagihan gas	Nomor pelanggan	Perum Gas
Bidang	Aset daerah	No. inventaris aset daerah	Pemda
Bidang	Aset negara	No. inventaris aset negara	Pemerintah Pusat
Bidang dan Personal	Sensus	Nomor sensus	BPS
Bidang dan Personal	Perusahaan	Nomor SIUP	Deperindag
Bidang dan Personal	Perusahaan	No. Surat Ijin Tempat Usaha	Pemda
Bidang dan Personal	Perusahaan	Akte Pendirian Perusahaan	Dept. Kehakiman

Ber macam jenis tanda pengenal yang dimiliki setiap individu berimplikasi pada minimnya integritas data kependudukan dan tidak adanya jaminan validasi identitas seseorang. Fakta yang terjadi dalam masyarakat adalah terdapatnya penduduk yang memiliki identitas ganda, misalnya memiliki lebih dari satu KTP karena alasan tempat tinggal. Di sisi lain, ada yang tidak memiliki identitas sama sekali.

## Permasalahan

Permasalahan identitas merupakan polemik multidimensi yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Deskripsi berikut menjelaskan korelasi antara persoalan identitas kependudukan dengan bidang politik, ekonomi, bisnis, pemerintahan, pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

**1. Minimnya integrasi data antar sejumlah instansi yang mengeluarkan identitas menyebabkan tidak adanya data yang akurat tentang jumlah populasi dan demografi penduduk Indonesia.**

Tidak adanya data yang akurat akan mempersulit pemerintah untuk menjalankan program pemerataan pembangunan. Tidak jelas siapa yang layak mendapatkan kompensasi BBM, tidak pasti di daerah mana saja perlu disuplai bantuan pangan dan medis untuk penderita busung lapar atau demam berdarah. Program pemerintah seperti Wajib Belajar dan Keluarga Berencana sulit diukur tingkat pencapaiannya tanpa data kongkrit dan terpadu.

**2. Identitas ganda dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengancam keamanan negara (*security*).**

Isu identitas ganda sering disalahgunakan oleh pelaku aksi terorisme untuk menyamarkan jejak kejahatannya. Penjahat kriminal dapat menjadi buronan yang sulit dilacak dengan cara memalsukan identitas atau membuat paspor ganda untuk melarikan diri ke luar negeri.

**3. Individu yang memiliki identitas ganda bisa saja berlaku curang dalam transaksi kependudukan.**

Misalnya A memiliki tanah dan bangunan yang terdaftar secara resmi dengan nomor identitas xxxxxxxxxxxx, tetapi untuk registrasi pajak menggunakan nomor identitas yyyyyyyyyy. A tidak dikenakan kewajiban pajak atas tanah dan bangunan miliknya.

**4. Berbagai jenis identitas yang harus dimiliki menggambarkan birokrasi yang rumit, berbelit-belit, dan merepotkan.**

Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun. Buruknya kinerja birokrasi juga mengakibatkan berkurangnya minat investor menanamkan modal di Indonesia.

**5. Banyaknya instansi yang menangani identitas dan data kependudukan yang saling tumpang tindih.**

Manajemen yang kurang baik bisa menyebabkan kekacauan sistem, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan membuka peluang terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

## *Single Identity Number*

Solusi dari persoalan ini adalah menciptakan suatu referensi identitas yang menjamin mekanisme validasi dan mereduksi dampak negatif yang terkait dengan masalah kependudukan. Untuk masing-masing individu, referensi identitas tersebut bersifat tunggal dan melekat seumur hidup. Gagasan ini dikenal sebagai *Single Identity Number* (SIN). SIN adalah suatu nomor unik yang terpadu dalam satu kartu identitas yang diberikan kepada seorang warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. SIN menjadi tanda pengenal seseorang ketika melakukan transaksi kependudukan, baik aktivitas yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan maupun kegiatan yang menyangkut pelayanan umum. SIN yang ideal merupakan nomor tunggal yang menjadi rujukan utama (*primary key*) terhadap identitas lainnya, seperti SIM, BPKB, NPWP, dan dokumen kependudukan lainnya.

Penulis merangkum enam keuntungan yang dapat diperoleh dengan penerapan SIN. Pertama, sebagai sebuah sistem digital, SIN akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan masyarakat. Data digital mudah diakses (*easy access*), dibagi dan dipakai secara bersama-sama (*data sharing*), dan digabungkan dengan data digital lainnya (*data integration*). Kedua, integrasi nomor identitas dari setiap lembaga ke dalam satu sistem nomor identitas tunggal akan memberikan nilai strategis. Institusi-institusi yang terlibat di dalam sistem ini dapat melakukan ekstraksi informasi lintas sektoral. Ketiga, SIN dapat digunakan sebagai sebuah perangkat pengawasan (*monitoring instrument*) terhadap tingkat kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban. Keempat, SIN memiliki kontribusi besar dalam perencanaan pembangunan karena memiliki kandungan informasi yang detil meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu daerah. Kelima, dalam upaya akselerasi peningkatan pemasukan negara dari sektor keuangan, SIN berperan melakukan penelusuran dan analisis potensi-potensi sumber daya pendapatan, terutama yang terkait dengan perpajakan. Keenam, SIN merupakan embrio menuju *e-Indonesia* (Indonesia yang berlandaskan *e-government*).

Beberapa negara maju dan berkembang sudah menerapkan SIN untuk identitas warga negara masing-masing dengan sistem penamaan yang berbeda untuk masing-masing negara. Di Amerika Serikat, dikenal *Social Security Number* (SSN). Di Kanada, ada istilah *Social Insurance Number* (SIN). Penduduk Malaysia menggunakan nomor identitas yang disebut *Malaysian Citizen Number*. Sejumlah negara lain juga dalam tahap pengembangan dalam membenahi sistem kependudukan yang lebih terpadu, contohnya Thailand.

### **Implementasi *Single Identity Number* di Indonesia**

Di Indonesia, gagasan identitas yang unik dan tunggal mulai digagas pemerintah sejalan dengan Inpres dan Kepres yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. SIN akan dibuat sebagai nomor bersama dengan sepuluh digit nomor untuk identitas tunggal yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Inpres No. 3/2004 tentang Sistem Pengenal Tunggal (*Single Identification Number*) mengacu pada Tap MPR No 5/2002 yang mengamanatkan dibangunnya sistem pengenal tunggal dengan nomor induk tunggal bagi penduduk di seluruh Indonesia. Selain itu, juga mengacu pada Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*. Keppres No. 72/2004 tanggal 6 September 2004 mengenai rencana *Single Identity Number* akan efektif berjalan pada 2006.

Pada tahap awal, penerapan *Single Identity Number* di Indonesia dilaksanakan dengan cara merancang *Common Identity Number* (CIN), yaitu suatu nomor bersama yang menjadi rujukan dari berbagai nomor identitas yang sudah ada saat ini. Seluruh data kependudukan dari bermacam identitas yang ada akan diintegrasikan ke CIN. Jika transfer data selesai dilakukan, CIN akan menjadi SIN. Keunikan identitas telah didukung sejak tahap CIN, sehingga implementasi CIN harus dilengkapi dengan mekanisme verifikasi untuk mencegah kemungkinan identitas ganda.

Pencapaian positif yang diharapkan dari penerapan SIN di Indonesia.

#### **1. SIN akan menjadi identitas nasional.**

Setiap penduduk Indonesia nantinya akan memiliki SIN sebagai satu-satunya identitas yang berlaku.

#### **2. SIN menjadi acuan sejumlah transaksi kependudukan di Indonesia.**

Dalam transaksi kependudukan, SIN akan dipakai sebagai rujukan. Jadi, tidak ada kerancuan identitas yang digunakan dalam proses identifikasi.

3. **SIN menjadi fondasi dari basis data kependudukan nasional.**  
Data penduduk yang memiliki SIN akan dicatat secara terpadu dalam basis data pusat dan daerah.
4. **SIN meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemakaian sumber daya.**  
Dengan diimplementasikan SIN berarti hanya satu instansi yang akan menangani identitas. Instansi-instansi lain yang sebelumnya juga mengurus masalah identitas, termasuk sumber daya manusia, dapat lebih fokus sesuai peran masing-masing dalam pembangunan. Selain itu, menyusutnya identitas yang harus dimiliki tentu mereduksi alokasi biaya yang dibutuhkan.
5. **SIN yang dilengkapi dengan biometrik dapat menjalankan fungsi sebagai *security tools* dalam masyarakat.**  
Sasaran utama implementasi SIN adalah menjamin keamanan dan privasi pemilik identitas. Penerapan SIN mencegah kemungkinan identitas ganda, sehingga dapat meminimalisasi tindak kejahatan akibat penyalahgunaan identitas. Di sisi lain, masing-masing identitas dijamin kerahasiaan karena tidak sembarang pihak boleh mengakses. Fungsi keamanan dan privasi dapat dijalankan dengan mekanisme verifikasi yang dapat diakomodasi dengan teknologi biometrik.

Walaupun demikian, tidak mudah mengimplementasikan *Single Identity Number*. Implementasi *Single Identity Number* (SIN) yang kompleks harus mempertimbangkan sejumlah faktor.

1. Faktor mekanisme
  - a. Instansi yang bertanggung jawab
  - b. Prosedur pembuatan, mencakup kapan seseorang harus memiliki SIN dan bagaimana cara memperolehnya.
  - c. Peraturan dan undang-undang yang mengatur
  - d. Anggaran biaya (*cost*).
2. Faktor teknologi
  - a. Arsitektur jaringan, yakni rancang bangun koneksi antar komputer yang menangani SIN.
  - b. *Database*, yakni struktur basis data tempat penyimpanan informasi kependudukan yang terkait dengan SIN.
  - c. *Smart card*, yakni sejenis “kartu pintar” berisi *chip* yang dipunyai oleh setiap pemilik identitas dan digunakan untuk akses dalam transaksi kependudukan.
  - d. Digit penomoran, yakni berapa angka yang akan digunakan untuk nomor identitas.
  - e. Keamanan (*security*), menyangkut mekanisme identifikasi, verifikasi, dan validasi sehingga SIN dapat menciptakan identitas yang unik dan tunggal.

Ketika sebuah solusi ditawarkan atas permasalahan yang ada, wajar jika solusi tersebut tidak dapat langsung diterima dan diadaptasi dalam masyarakat. Seperti halnya, ide SIN yang sebenarnya sudah digagas beberapa tahun yang lalu. Dalam realisasinya, implementasi SIN di Indonesia masih menemui berbagai tantangan dan kendala. Namun, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan identitas yang tunggal dan unik diterapkan di Indonesia. Perlu kerjasama sejumlah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat agar target “satu penduduk Indonesia satu identitas” dapat terwujud pada tahun 2010 mendatang.

## Referensi

Bakri, Marina., dkk. 2005, 18 November. "Single Identity Number : Satu Nomor Untuk Semua". *Warta Ekonomi*.

Ega. 2004, 30 Juli. "Presiden Keluarkan Inpres untuk SIN". *Harian Sinar Harapan*.

Hasibuan, Zainal A. dkk. 2006. *Database Kependudukan Nasional Sebagai Prasyarat Untuk Pelaksanaan Good Governance*. Paper Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

Suharno. 2004, Februari. "Menggapai Kesejahteraan Lewat SIN". *e-Bizz Asia* volume II no 14

## Biografi Penulis



**Rahmad Mahendra.** Mahasiswa S1 Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang sedang menyelesaikan semester terakhir. Asisten peneliti Lab *Formal Method in Software Engineering* dan Lab *Information Retrieval* Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang memiliki hobi membaca dan menulis ini pernah menulis beberapa paper dengan topik *e-Learning* dan *e-Government*.

e-mail: [rm.csui04@gmail.com](mailto:rm.csui04@gmail.com)